

PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DI JAWA TENGAH (Studi Komparasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera)

Haniatul Mufidah¹, Nur Hidayat Sardini²

Email: haniatulmufidah13@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi strategis partai politik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, mencakup pendidikan bagi kader dan anggota partai (internal) maupun bagi masyarakat luas (eksternal). Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut masih bervariasi dan belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk program pendidikan politik PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jawa Tengah serta mengevaluasi pelaksanaannya, dengan membandingkan dua partai yang memiliki basis ideologi berbeda sekaligus menganalisis kedua dimensi pendidikan politik yaitu internal dan eksternal secara bersamaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif komparatif-deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ideologi menjadi faktor penentu yang membentuk karakter pendidikan politik masing-masing partai. Pada dimensi internal, PDI Perjuangan menjalankan kaderisasi berjenjang tiga tingkat dengan materi Pancasila, Marhaenisme, dan ajaran Bung Karno. PKS menjalankan pembinaan melalui Unit Pembinaan Anggota (UPA) secara mingguan dengan kurikulum terstandar yang mengintegrasikan nilai keislaman dan kepemimpinan. Pada dimensi eksternal, PDI Perjuangan menjangkau masyarakat melalui kegiatan sosial berbasis potensi lokal, sedangkan PKS melalui pelayanan sosial, seminar publik, dan safari politik. PDI Perjuangan unggul dalam jangkauan dan inklusivitas program, sementara PKS unggul dalam kedalaman pembinaan kader. Evaluasi menunjukkan keduanya belum sepenuhnya memenuhi tiga indikator UU Nomor 2 Tahun 2011, yakni peningkatan kesadaran hak dan kewajiban warga negara, peningkatan partisipasi politik, dan pembentukan kemandirian serta karakter bangsa. Hambatan utama meliputi pragmatisme politik masyarakat, praktik politik uang, dan ketimpangan alokasi dana bantuan politik antardaerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ideologi partai secara nyata membentuk arah dan metode pendidikan politik, namun regulasi yang ada masih terlalu sederhana dan belum mampu menjamin kualitas pendidikan politik yang substantif dan merata, khususnya bagi masyarakat sebagai sasaran eksternal.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Partai Politik, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Jawa Tengah

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Political education is one of the strategic functions of political parties mandated by Law Number 2 of 2011, encompassing education for party cadres and members (internal) as well as for the general public (external). In practice, however, its implementation remains varied and has yet to be fully effective. This study aims to analyze the forms of political education programs conducted by Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) and the Prosperous Justice Party (PKS) in Central Java and to evaluate their implementation, by comparing two parties with distinct ideological foundations while simultaneously analyzing both dimensions of political education, namely the internal and external dimensions. This study employs a qualitative comparative-descriptive method, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman model. The findings indicate that ideological orientation is the determining factor shaping each party's approach to political education. In the internal dimension, PDI Perjuangan implements a three-tier cadre system centered on Pancasila, Marhaenism, and the teachings of Bung Karno. PKS conducts weekly cadre development through the Member Development Unit (UPA) using a standardized curriculum that integrates Islamic values and leadership principles. In the external dimension, PDI Perjuangan reaches the public through community-based social activities, while PKS engages society through social services, public seminars, and political outreach. PDI Perjuangan excels in the breadth and inclusivity of its public outreach, while PKS excels in the depth of cadre development. Evaluation reveals that neither party has fully met the three indicators stipulated under Law Number 2 of 2011, namely increasing public awareness of civic rights and obligations, enhancing political participation, and fostering national character and civic independence. Key obstacles include political pragmatism among the public, the prevalence of money politics, and disparities in the distribution of state political funding across regions. This study concludes that party ideology concretely shapes the direction and methods of political education. However, existing regulations have yet to be capable of guaranteeing substantive and equitable political education quality, particularly for the general public as the primary external target.

Keywords: Political Education, Political Parties, Indonesian Democratic Party of Struggle, Prosperous Justice Party, Central Java

PENDAHULUAN

Pendidikan politik merupakan proses yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik warga negara melalui penyampaian pengetahuan mengenai hak, kewajiban, nilai, serta norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kantaprawira (2006) menegaskan bahwa pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan membentuk nilai-nilai moral serta orientasi politik individu agar mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam sistem demokrasi. Pendidikan politik pada dasarnya merupakan bentuk sosialisasi politik langsung (Haryanto, 2018) yang dijalankan berbagai agen, mulai dari keluarga, sekolah, media massa, pemerintah, hingga partai politik (Rush & Althoff, 1971).

Kewajiban partai politik menyelenggarakan pendidikan politik bersifat permanen dan tidak terikat pada momentum elektoral. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat luas, mencakup pendalaman nilai empat pilar kebangsaan, pemahaman hak dan kewajiban warga negara, serta pengkaderan berjenjang dan berkelanjutan. Pasal 34 ayat (3a) bahkan menegaskan bahwa bantuan keuangan dari APBN/APBD diprioritaskan untuk pendidikan politik, dengan ketentuan minimal 60% dana bantuan digunakan untuk kegiatan tersebut. Ketentuan ini menempatkan negara sebagai mitra partai

dalam memperkuat demokrasi melalui investasi pada pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, terdapat kesenjangan yang mencolok antara ketentuan normatif dengan realitas implementasi di lapangan. Partai politik memiliki kewenangan yang sangat luas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara konstitusional, partai politik merupakan satu-satunya lembaga yang diberi hak oleh UUD 1945 untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3). Selain itu, partai politik juga memegang kendali besar dalam menyeleksi dan mengusulkan pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, mulai dari calon kepala daerah, anggota legislatif, hingga turut menentukan pimpinan lembaga-lembaga negara strategis melalui mekanisme *fit and proper test* di DPR.

Kewenangan yang begitu besar tersebut semestinya diimbangi dengan tanggung jawab substantif dalam menjalankan pendidikan politik, bukan sekadar berorientasi pada perolehan kekuasaan elektoral semata. Namun dalam praktiknya, sejumlah indikasi menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum dijalankan secara optimal. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (2024) mengidentifikasi bahwa salah satu masalah integritas partai politik di Indonesia adalah lemahnya fungsi pendidikan politik dan kaderisasi yang berkelanjutan, sehingga rekrutmen politik kerap lebih mengandalkan popularitas atau modal finansial dibandingkan hasil pembinaan ideologis yang matang. Survei Lembaga Survei Indonesia (2023) turut memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai lembaga masih tergolong rendah dibandingkan lembaga negara lainnya, yang mengindikasikan lemahnya kedekatan dan literasi politik yang berhasil dibangun partai kepada masyarakat luas.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pendidikan politik dari berbagai perspektif. Rahayaan (2024) menemukan bahwa keluarga menjadi agen dominan pembentukan kesadaran politik pemilih pemula, sementara media massa berperan sebagai agen sekunder. Panggabean dan Yuwono (2025) mengkaji transformasi pendidikan politik melalui platform digital *Bijakmemilih.id* yang mampu menjalankan fungsi edukasi secara komprehensif meski masih memiliki keterbatasan pada aksesibilitas dan komunikasi dua arah. Adapun Buana, Erlina, dan Rahman (2021) mengkritisi lemahnya paradigma pendidikan politik internal partai dalam isu antikorupsi dan kesetaraan gender, yang menunjukkan bahwa pendidikan politik belum sepenuhnya menjadi investasi strategis jangka panjang bagi kualitas demokrasi.

Berdasarkan pemaparan kajian-kajian tersebut, penelitian mengenai pendidikan politik masih menyisakan kekosongan analitis yang mendasar, khususnya dalam menempatkan partai politik sebagai aktor utama penyelenggara sekaligus membandingkan praktik pendidikan politik antarpolisi dengan basis ideologi yang berbeda secara mendasar. Belum banyak kajian yang secara spesifik memperbandingkan partai nasionalis-kerakyatan dengan partai berbasis Islam di tingkat provinsi. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara komparatif pendidikan politik yang dijalankan PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah, khususnya mengenai bagaimana kedua partai merancang pendekatan, memilih media dan materi, menentukan sasaran, serta mengevaluasi pelaksanaan pendidikan politik pada dimensi internal dan eksternal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-komparatif untuk menggambarkan secara mendalam pendidikan politik yang dijalankan PDI Perjuangan dan PKS di Jawa

Tengah, dengan lokasi penelitian di kantor DPD dan DPC PDI Perjuangan Jawa Tengah serta kantor DPW PKS Jawa Tengah. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan kunci dari kedua partai, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laman partai, peraturan perundang-undangan, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2007) meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi.

KERANGKA TEORITIS

Pendidikan Politik (*Political Education*)

Pendidikan politik dimaknai sebagai proses terencana dan terstruktur dalam membentuk individu menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan memiliki orientasi politik yang jelas (Kantaprawira, 2006). Ranjabar (2019) menegaskan bahwa pendidikan politik menekankan realisasi diri manusia di tengah medan sosial dan politik dengan segenap pluriformitasnya. Tujuan pendidikan politik dapat dilihat dari dua perspektif yang saling melengkapi: dari sisi partai sebagai penyelenggara, tujuannya adalah membentuk kader tangguh yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat (Lubis, 1989); dari sisi individu sebagai penerima, tujuannya adalah membentuk warga negara yang kritis, mandiri, dan mampu berpartisipasi aktif dalam demokrasi (Kartono, 2009). Secara normatif, Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengamanatkan tiga tujuan pendidikan politik, yaitu meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta meningkatkan kemandirian dan karakter bangsa. Sardini dan Fitriyah (2021) menjelaskan bahwa partai politik dapat menjalankan peran ideal sebagai agen sosialisasi politik melalui tiga jalur, yaitu pendidikan politik terstruktur, keteladanan perilaku kader di lembaga legislatif dan eksekutif, serta menjadi sumber motivasi budaya politik demokratis.

Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pemilih

Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) merupakan proses penyiapan generasi muda untuk berperan dan bertanggung jawab sebagai warga negara (Kerr, 1999). Winataputra (2016) merumuskan tiga paradigma *civic education*, yaitu *learning about*, *through*, dan *for democracy*, yang menegaskan bahwa nilai demokrasi harus dihayati melalui praktik nyata, bukan sekadar transfer pengetahuan verbal. Adapun pendidikan pemilih (*voter education*) menurut Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 adalah proses penyampaian informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pemilih tentang Pemilu. Dwipayana dalam Rozuli dan Haboddin (2018) menegaskan bahwa hakikat pendidikan pemilih adalah mengubah warga negara dari sekadar *votes* menjadi *voice*, yaitu pemilih yang kritis dan mampu mengontrol kekuasaan politik, bukan sekadar memahami prosedur teknis pencoblosan.

Sosialisasi Politik

Almond sebagaimana disunting Mas'od dan MacAndrews (2018) menjelaskan bahwa sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang secara khusus membentuk nilai-nilai politik dan menunjukkan bagaimana seharusnya setiap anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Proses ini tidak berhenti pada lingkungan keluarga, melainkan meluas melalui *peer group*, tempat kerja, organisasi keagamaan, dan partai politik (Budiardjo, 2003). Dawson dalam Haryanto (2018) membedakan metode sosialisasi politik menjadi langsung dan tidak langsung; pendidikan politik oleh partai termasuk kategori metode langsung karena secara eksplisit mentransmisikan nilai, sikap, dan orientasi politik melalui agen sosialisasi yang terstruktur. Rush dan Althoff (1971) menempatkan partai politik sebagai salah satu dari enam lembaga agen sosialisasi politik utama, sehingga kualitas pendidikan politik yang dijalankan partai akan turut menentukan kualitas orientasi politik masyarakat dalam jangka panjang.

Ideologi Partai (*Ideological Parties*)

Kristeva (2010) mendefinisikan ideologi sebagai pemikiran mendasar yang melahirkan doktrin dan formula politik, dengan tiga dimensi utama yaitu realitas, idealisme, dan fleksibilitas. McClosky sebagaimana dikutip Firmanzah (2011) mendefinisikan *ideological parties* sebagai sistem keyakinan yang terintegrasi dan koheren, yang menjustifikasi penggunaan kekuasaan serta menghubungkan ranah politik dengan bidang kehidupan lain. Ideologi partai dengan demikian bukan sekadar identitas formal, melainkan sistem nilai yang bekerja nyata dalam menentukan arah, metode, dan sasaran pendidikan politik yang dijalankan sebuah partai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Politik oleh Partai Politik

Pendidikan politik didefinisikan sebagai salah satu fungsi dasar partai politik yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan perbedaan yang tegas antara kaderisasi yang ditujukan bagi kader partai dan sosialisasi atau pendidikan politik yang ditujukan bagi seluruh kalangan termasuk masyarakat umum, sebagai sarana meningkatkan pemahaman anggota partai dan masyarakat terhadap berbagai proses politik yang berlangsung sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih sadar dalam kegiatan politik. Pemaknaan tersebut menegaskan bahwa pendidikan politik dijalankan pada dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu dimensi internal kepada kader dan dimensi eksternal kepada masyarakat luas, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mewajibkan penggunaan dana bantuan politik untuk kedua dimensi tersebut, bukan untuk kegiatan kampanye, yang pelaksanaannya pada praktiknya sangat dipengaruhi oleh orientasi ideologi masing-masing partai sehingga menghasilkan karakteristik program yang berbeda.

Program Pendidikan Politik PDI Perjuangan di Jawa Tengah

Pendidikan politik PDI Perjuangan berakar pada ideologi Pancasila dan ajaran Bung Karno yang menjadi kerangka operasional dalam merancang arah dan substansi program. Pada dimensi internal, PDI Perjuangan menjalankan sistem kaderisasi berjenjang tiga tingkat, yaitu pratama, madya, dan utama, yang masing-masing berfungsi memperkenalkan nilai dasar ideologi, memperkuat kapasitas strategi dan kepemimpinan, serta membentuk kader untuk posisi strategis. Materi kaderisasi mencakup ajaran Bung Karno dan Pancasila, pengetahuan kepartaian, serta muatan lokal. Selain kaderisasi reguler, terdapat pula kaderisasi tematik bagi kepala daerah, anggota legislatif, dan kader muda melalui organisasi sayap partai.

Pada dimensi eksternal, PDI Perjuangan menjangkau masyarakat melalui kegiatan sosial berbasis potensi lokal seperti urban farming, penyuluhan kebakaran, dan pemberdayaan ekonomi komunitas, serta kehadiran aktif dalam situasi bencana sebagai medium pendidikan politik. Untuk menjangkau generasi muda, partai menggunakan metode dialog dan talkshow interaktif dua arah. Informan menjelaskan orientasi sasaran partai sebagai berikut: *"Ini partai inklusif, gak boleh jadi partai eksklusif. sasarannya semua masyarakat, kita memang menasbihkan diri sebagai partainya wong cilik."* (Wawancara dengan Wakil Ketua Taruna Merah Putih Jawa Tengah, 2026)

Pendekatan inklusif tersebut membuat pendidikan politik PDI Perjuangan mampu menjangkau masyarakat secara luas, meskipun terdapat catatan kritis bahwa batas antara pendidikan politik yang edukatif dengan mobilisasi kepentingan elektoral menjadi cenderung kabur ketika dijalankan oleh partai yang juga berstatus kontestan pemilu. Pemanfaatan media sosial dalam pendidikan politik PDI Perjuangan relatif

terbatas karena partai lebih menitikberatkan pada kerja nyata langsung di tengah masyarakat dibandingkan strategi komunikasi digital.

Program Pendidikan Politik PKS di Jawa Tengah

Pendidikan politik PKS berangkat dari ideologi Islam yang ditempatkan sebagai ruh dalam seluruh aspek organisasi. Pada dimensi internal, pembinaan kader dilakukan melalui Unit Pembinaan Anggota (UPA) secara mingguan dalam kelompok kecil berisi 5-10 orang, dengan kurikulum yang mengintegrasikan materi keislaman, kepemimpinan, dan wawasan politik. Sistem UPA terintegrasi dengan jenjang kaderisasi tiga tingkat, yaitu pendukung, penggerak, dan pelopor, di mana kader pada jenjang lebih tinggi berperan sekaligus sebagai agen pendidikan politik bagi jenjang di bawahnya. PKS juga menerapkan mekanisme sanksi berjenjang bagi anggota yang tidak mengikuti pembinaan, sehingga partisipasi kader terjaga secara konsisten.

Pada dimensi eksternal, PKS menjalankan Training Orientasi Partai (TOP) setiap enam bulan yang terbuka bagi masyarakat umum, program Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang menyasar ibu rumah tangga dan keluarga di luar keanggotaan partai, kegiatan seni dan budaya Jawa seperti pelatihan pranoto coro dan unggah-ungguh, serta kehadiran aktif dalam situasi bencana yang didukung pendanaan kolektif dari anggota dan kader PKS. PKS juga menjalankan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara rutin oleh anggota DPRD kepada konstituen, serta memanfaatkan media sosial melalui program Kabeh Dadi Humas yang mendorong setiap kader menjadi penyebar pesan kebaikan secara peer-to-peer. Informan menjelaskan filosofi di balik pendekatan tersebut: *"Kami menginginkan anggota yang mendapatkan pendidikan politik ini dia akan melakukan pendidikan politik pula kepada masyarakat luas di lingkungan masing-masing."* (Wawancara dengan Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga PKS, 2025)

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa PKS mengandalkan pola jaringan berbasis konstituen yang terpetakan hingga tingkat TPS. Meskipun demikian, PKS lebih banyak memfokuskan sumber daya pada pembinaan internal, sehingga jangkauan eksternalnya sangat bergantung pada kemampuan difusi nilai melalui kader di lapangan.

Tantangan dan Kendala Pelaksanaan Program

Pelaksanaan pendidikan politik oleh kedua partai tidak terlepas dari berbagai dinamika tantangan di lapangan. Tingkat pemahaman politik masyarakat Jawa Tengah masih beragam, sebagian telah memiliki kesadaran politik yang cukup baik, namun sebagian lain masih memandang politik secara pragmatis sebagai ajang perebutan kekuasaan semata. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang belum merata menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pendidikan politik. Keterbatasan kesejahteraan dapat memengaruhi cara masyarakat merespons pesan-pesan politik, karena dalam kondisi tertentu kebutuhan material masih menjadi pertimbangan utama dibandingkan pemahaman politik yang bersifat substantif. Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu informan yang menilai bahwa efektivitas pendidikan politik tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat: *"Tantangan tadi satu, gimanaapun politik kita gak bakal kemana-mana kalau keadaan sosial ekonomi masyarakat masih seperti ini, kenapa negara-negara barat demokrasinya kita lihat ya setidaknya lebih oke dibandingkan kita karena mereka udah nggak mikir lagi."* (Wawancara dengan Wakil Ketua Taruna Merah Putih, 05 Februari 2026)

Tantangan lain yang dihadapi kedua partai adalah maraknya praktik politik uang yang menggeser orientasi masyarakat dari partisipasi berbasis kesadaran menuju transaksi jangka pendek. Di sisi lain, ketimpangan alokasi dana bantuan politik antardaerah turut membatasi kapasitas partai

di Jawa Tengah dalam menyelenggarakan pendidikan politik secara masif, mengingat jumlah pemilih yang harus dilayani tidak sebanding dengan besaran dana bantuan per kapita yang diterima dibandingkan provinsi lain. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan politik partai tidak dapat dilepaskan dari dukungan regulasi yang lebih operasional serta perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi pelaksanaan pendidikan politik kedua partai dianalisis berdasarkan tiga indikator Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yaitu peningkatan kesadaran hak dan kewajiban warga negara, peningkatan partisipasi politik, serta pembentukan kemandirian dan karakter bangsa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kedua partai belum sepenuhnya memenuhi ketiga indikator tersebut. PDI Perjuangan menghadapi kecenderungan pendidikan politik yang lebih terkonsentrasi pada kaderisasi internal, sementara pendidikan politik kepada masyarakat umum belum sepenuhnya terlembagakan dan berisiko bergeser menjadi mobilisasi dukungan elektoral. PKS menghadapi tantangan serupa berupa sistem pembinaan intensif yang lebih banyak menyasar kader dan anggota resmi, sehingga dampaknya kepada masyarakat luas masih bergantung pada kader sebagai perantara.

Kedua partai juga berhadapan dengan hambatan struktural yang sama, yaitu kondisi sosial-ekonomi masyarakat, tingginya pragmatisme politik, praktik politik uang, serta ketimpangan indeks dana bantuan politik antardaerah yang membuat partai di Jawa Tengah harus melayani lebih banyak pemilih dengan dana per kapita yang jauh lebih kecil dibandingkan provinsi lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan politik tidak semata-mata ditentukan oleh desain program partai, tetapi juga oleh faktor eksternal berupa regulasi dan realitas sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi sarannya.

Analisis Perbandingan PDI Perjuangan dan PKS

Perbandingan program kedua partai menegaskan bahwa ideologi bukan sekadar identitas formal, melainkan sistem nilai yang bekerja nyata dalam menentukan arah, metode, materi, dan sasaran pendidikan politik. Tabel 1 merangkum perbedaan utama antara kedua partai pada dimensi internal dan eksternal.

Tabel 1. Perbandingan Pendidikan Politik PDI Perjuangan dan PKS

Aspek	PDI Perjuangan	PKS
Basis ideologi	Pancasila & Marhaenisme	Ideologi Islam
Model Program	Terbuka-partisipatif, fleksibel kontekstual	Tertutup-intensif, terstandar nasional
Kaderisasi internal	Berjenjang: pratama, madya, utama + tematik	UPA mingguan; jenjang pendukung, penggerak, pelopor
Program eksternal	Kegiatan sosial berbasis potensi lokal, talkshow Gen Z, pendidikan politik berbasis kepedulian sosial	TOP, RKI, seni budaya, sosialisasi, pendidikan politik berbasis kepedulian sosial
Keunggulan	Jangkauan luas dan inklusivitas program masyarakat	Kedalaman pembinaan dan konsistensi ideologis kader
Kelemahan	Batas kabur antara edukasi dan mobilisasi elektoral	Jangkauan eksternal bergantung pada difusi kader
Evaluasi	Tahunan via Rakerda/Rakernas	Digital real time+ berkala berjenjang

Sumber: Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara mendalam, 2026

Perbedaan filosofi tersebut mencerminkan dua model pendidikan politik yang saling melengkapi. PDI Perjuangan menempatkan ideologi sebagai pembeda identitas yang diwujudkan secara fleksibel dan kontekstual sehingga lebih inklusif dan mampu menjangkau masyarakat luas, meskipun rentan terhadap inkonsistensi kualitas antardaerah. PKS menempatkan ideologi Islam sebagai ruh yang menggerakkan seluruh pembinaan secara konsisten dan terstandar, menghasilkan kader dengan militansi ideologis tinggi, namun dengan jangkauan eksternal yang lebih terbatas pada kelompok yang terhubung dengan jaringan partai. Temuan ini mengonfirmasi proposisi Firmanzah (2011) tentang ideological parties bahwa ideologi bekerja nyata dalam menentukan arah dan cara partai mendekati masyarakat, bukan sekadar tercantum dalam anggaran dasar organisasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah menjalankan pendidikan politik dalam dua dimensi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yakni pendidikan bagi kader dan anggota partai serta pendidikan bagi masyarakat luas, dengan bentuk yang berbeda secara mendasar akibat perbedaan orientasi ideologi. Pada dimensi internal, PDI Perjuangan menyelenggarakan kaderisasi berjenjang tiga tingkat dilengkapi kaderisasi tematik, sementara PKS menjalankan pembinaan mingguan melalui UPA dengan kurikulum terstandar yang mengintegrasikan nilai keislaman. Pada dimensi eksternal, PDI Perjuangan menjangkau masyarakat melalui kegiatan sosial berbasis potensi lokal, sedangkan PKS menjangkau masyarakat melalui TOP, RKI, seni budaya, dan digitalisasi.

Perbedaan bentuk program tersebut mencerminkan perbedaan filosofi mendasar tentang bagaimana perubahan sosial-politik terjadi yaitu PDI Perjuangan unggul dalam jangkauan dan inklusivitas, sementara PKS unggul dalam kedalaman pembinaan kader

dan konsistensi ideologis. Berdasarkan evaluasi, kedua partai belum sepenuhnya memenuhi tiga indikator keberhasilan pendidikan politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, akibat hambatan struktural berupa pragmatisme politik masyarakat, praktik politik uang, serta ketimpangan dana bantuan politik antardaerah. Penelitian ini menegaskan bahwa ideologi partai secara nyata membentuk arah, metode, materi, dan sasaran pendidikan politik, sementara regulasi yang ada masih terlalu minimalis untuk menjamin kualitas pendidikan politik yang substantif dan merata bagi masyarakat sebagai sasaran eksternal.

SARAN

Bagi PDI Perjuangan dan PKS, disarankan untuk memperkuat pendidikan politik kepada masyarakat umum secara substantif dan konsisten sepanjang tahun, menjaga agar program tersebut tidak bergeser menjadi mobilisasi elektoral, serta membuka program pendidikan politik kepada masyarakat di luar keanggotaan resmi. Bagi pemerintah, KPU, dan Bawaslu, diperlukan penyusunan pedoman teknis operasional mengenai bentuk kegiatan pendidikan politik yang dapat dibiayai dana bantuan politik disertai standar minimal yang terukur, peninjauan mekanisme distribusi dana bantuan politik antardaerah, serta penguatan kerja sama lintas partai dalam kegiatan pendidikan pemilih untuk mengurangi polarisasi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan mengkaji secara khusus efektivitas program pendidikan politik eksternal terhadap perubahan pengetahuan dan perilaku politik masyarakat, termasuk dengan pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan wawancara mendalam dengan survei kuantitatif kepada masyarakat penerima program.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Buana, M. S., Erlina, E., & Rahman, E. Y.

- (2021). Paradigma pendidikan politik antikorupsi dan kesetaraan gender di partai politik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 23-42.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efriza. (2012). *Political explore: Sebuah kajian ilmu politik*. Bandung: Alfabeta.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola partai politik: Komunikasi dan positioning, ideologi politik dan era demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Haerul, I. (2019). Peranan pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik siswa kelas X di MA Al-Muthmainnah. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan*, 9(1).
- Haryanto. (2018). *Sosialisasi politik: Suatu pemahaman awal*. Yogyakarta: PolGov.
- Kantaprawira, R. (2006). *Sistem politik Indonesia: Suatu model pengantar (Edisi revisi)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Kerr, D. (1999). Citizenship education in the curriculum: An international review. *School Field*, 10(3/4), 5-32.
- Kristeva, N. S. S. (2010). *Sejarah ideologi dunia*. Yogyakarta: Eye on The Revolution Press & INPHISOS.
- Lubis, S. (1989). *Serba-serbi politik dan hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mas'oed, M., & MacAndrews, C. (2018). *Perbandingan sistem politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Panggabean, I. M., & Yuwono, T. (2025). Transformasi media pendidikan politik di era politik kontemporer melalui website *Bijakmemilih.id*. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 529-541.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Rahayaan, S. A. I. (2024). Pengaruh sosialisasi politik dalam keluarga dan sosialisasi politik media massa terhadap partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Umum Presiden 2024 di Kota Semarang (Skripsi). Universitas Diponegoro.
- Ranjabar, J. (2019). *Sistem politik Indonesia: Sistem politik, demokrasi, dan pendidikan politik*. Bandung: Alfabeta.
- Rozuli, A. I., & Haboddin, M. (2018). Pendidikan pemilih dan penguatan demokrasi. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(2), 129-148.
- Rush, M., & Althoff, P. (1971). *An introduction to political sociology*. London: Nelson.
- Sardini, N. H., & Fitriyah. (2021). *Pemilihan umum dan partai politik*. Semarang: CV Alinea Media Dipantara.
- Suranef, & Al Rafni. (2016). Pendidikan pemilih (voter's education) dan pemilih pemula. *Jurnal Analisis Politik*, 1(2), 61-62.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Winataputra, U. S. (2016). Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dalam konteks sistem pendidikan nasional. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1)